

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini masyarakat Indonesia tidak bisa terlepas dari media massa. Sesuai dengan namanya media massa adalah media yang mempunyai segmentasi luas dan dapat menimbulkan efek-efek positif dan negatif bagi khalayak masyarakat atau audience. Media massa mempunyai klasifikasi-klasifikasi tersendiri dalam perkembangannya, ada media cetak seperti koran, majalah, tabloid dan lain-lain dan ada media elektronik seperti radio, televisi dan film. Dalam hal ini secara spesifik kita akan membahas mengenai film.

Film adalah suatu narasi atau cerita yang telah tersusun dan diceritakan kembali melalui media audio visual. Dalam perkembangannya film mempunyai klasifikasi atau jenis tersendiri mulai dari film horor, *action*, komedi dll yang semuanya mempunyai dampak dan pengaruh yang beraneka ragam terhadap pemirsanya. Ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Dalam mengantisipasi dan meminimalisir pengaruh negatif tersebut dibentuklah suatu lembaga yang bertanggung jawab yaitu lembaga sensor film yang mana dalam pembuatan film ada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada lembaga sensor film.

Adapun sejarah dan definisi lembaga Sensor Film sesuai dengan Undang-undang No 8 Tahun 1992 tentang Perfilman kemudian disusul dengan Peraturan

Pemerintah No 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film. Dengan jelas disebutkan yang dimaksud dengan Sensor Film adalah penelitian dan penilaian terhadap film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dan reklame film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu. Penyensoran dilakukan dengan meneliti segi-segi : Keagamaan, Ideologi dan Politik, Sosial Budaya dan Ketertiban Umum.

LSF berusaha menjembatani antara insan film, hasil karya insan film dan pemirsa, sehingga tayangan menjadi layak untuk di tonton. Sungguh hal ini tidak bermaksud menyusahkan. Apalagi mengingat kebhinekaan Indonesia, baik budaya, sosial dan lain-lainnya. Dalam menyensor selain kriteria yang baku juga menggunakan akhlak, akal, ilmu dan rasa. Selain kriteria yang tersebut di atas LSF juga mempunyai visi dan misi diantaranya :

Visi :

"Meningkatkan daya saring informasi masyarakat Indonesia dalam rangka pelestarian dan pengembangan tata nilai budaya bangsa"

Misi :

1. Melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan dan penayangan film dan reklame film.
2. Bersama Lembaga dan Pihak Terkait menjadi "Garda Budaya Bangsa" memasuki era perubahan yang tetap menghargai nilai-nilai moral dan budaya.

3. Menjembatani keanekaragaman pandangan budaya untuk menciptakan persepsi yang sama demi kesatuan dan persatuan bangsa.

Perkembangan film dewasa ini menjadikan para sineas menjadi semakin kreatif dan kritis dalam mensikapi segala sesuatu yang ada disekitar. Mereka berusaha berlomba-lomba menuangkan gagasan dan ide dalam mensikapi segala sesuatu melalui film. Dalam suatu kondisi ada kalanya sineas sangat idealis dengan ide dan gagasannya dalam mensikapi sesuatu sehingga dia tidak menghiraukan norma-norma dan budaya dari bangsanya. Hal inilah yang menuntut pentingnya peranan lembaga sensor film atau LSF untuk mengkoreksi tampilan atau hiburan yang layak dan sesuai dengan norma masyarakat yang semuanya tertuang dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan perfilman. Akan tetapi terkadang batasan antara idealis dan seni menjadi semu. Yang mana pada titik akhir akan menimbulkan perdebatan antara tetap menampilkan cerita sesuai versi asli dari sineas tanpa mengurangi makna dan mengubah narasi atau melakukan pemotongan yang sesuai dengan norma.

Dari ringkasan kasus di atas para sineas mengajukan keberatan mengenai keberadaan lembaga sensor film atau LSF. LSF dirasa membatasi ide dan kreatifitas para sineas sehingga pesan utama menjadi rancu dan tidak terkomunikasikan dengan baik. Dari latar belakang di atas para sineas meminta perubahan beberapa pasal yang ada pada UU No.8/1992 tentang perfilman yang sedang diujikan di Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapkan pada UUD 45. Intinya para pemohon keberatan adanya sensor karena itu bertentangan dengan HAM. Para pemohon ialah para pekerja film dari angkatan muda. Mereka adalah Riri

Riza (sutradara), Nia Dinata (produser film), Tino Saroengallo (sutradara, pengajar di IKJ), dan Annisa Nurul Shanty (aktris). Mereka mengajukan permohonan pengujian isi sebagian UU Perfilman, yakni pasal 14, pasal 33, dan pasal 34, yang diperhadapkan dengan pasal 28F UUD 45, pasal 14 tentang definisi sensor. Pasal 33 mengenai wajib sensor buat tiap film, reklame film, akibat sensor (lolos tidak lolos, dan lain-lain), film yang ditolak sensor, pemiliknya dapat mengajukan keberatan atau pembelaan. Pasal 34 tentang keberadaan Lembaga Sensor Film (LSF). Pasal 28F UUD 45 berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Oleh pemohon, sebagian isi UU Perfilman dianggap membatasi dan atau menghalang-halangi kebebasan dan kemerdekaan warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh informasi melalui film, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal yang dimaksud, yaitu karena adanya penyensoran. Dengan adanya penyensoran, telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagai pelaku perfilman Indonesia. LSF dianggap telah melakukan tindakan menghambat dan menghalangi arus informasi yang seharusnya dibuka bebas. LSF juga dianggap telah melakukan tindakan pelanggaran HAM. Pemohon juga memperhadapkan pasal-pasal di atas pada pasal 28C Ayat 1 UUD 45:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri, melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia."

Pasal 40 dan pasal 41 ayat 1 UU Perfilman juga diujikan terhadap pasal 28F UUD 45 yang isinya mengenai aturan ketentuan pidana dalam UU Perfilman sepanjang mengenai sensor film dianggap bertentangan. Selain itu, soal sensor menyensor tersebut juga berkaitan dengan isi tayangan TV. UU no 32/2002 tentang penyiaran, pasal 47 menyebutkan, "isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang." Lembaga yang berwenang ini adalah LSF.

Dari penjabaran di atas mengenai pro dan kontra pembubaran LSF tentunya akan membawa dampak tersendiri bagi MFI, baik itu bagi para produsen, penonton dan komunitas film. Komunitas film adalah kumpulan orang yang mempunyai visi dan misi serupa yang tergabung atau terwadahi dalam suatu organisasi tertentu yang bergerak dalam hal perfilman. Seperti halnya dunia pendidikan, komunitas film pun tersebar di seluruh Indonesia baik itu yang terdaftar dalam suatu badan pendidikan (sekolah atau universitas) maupun yang berdiri sendiri. Dimana mereka mulai membuat sebuah karya, menjalin jaringan, melakukan peningkatan SDM dan kemudian memformulasikan diri menurut tujuan dan cara mereka sendiri.

Berbicara komunitas film di Yogyakarta memang cukup unik. Karena tidak semua komunitas film bergerak di ranah ataupun spesialisasi program yang sama yaitu produksi film. Ada beberapa jenis karakter komunitas yang tidak selalu bergerak di bidang produksi film. Beberapa bergerak di bidang apresiasi dan wacana seputar film seperti Kine, beberapa komunitas juga hanya bergerak di bidang eksebisi/ festival, ada juga komunitas yang sifatnya menjadi database

komunitas seperti Rumah Sinema, dan yang terakhir memang memiliki spesialisasi produksi seperti Four Colour, CIKO, dan sederetan nama lainnya. Bahkan ada komunitas film yang hanya beranggotakan 2(dua) atau lebih anggota. Inilah yang kemudian menjadikan pola karakter komunitas di Yogyakarta menjadi unik. Namun tidak hanya sekedar itu saja yang menjadikan Yogyakarta menjadi unik, akan tetapi Yogyakarta adalah kota pelajar yang mana terdapat banyak perguruan tinggi dan sekolah-sekolah favorit. Dari beberapa tempat pendidikan yang ada di Yogyakarta, banyak para pelajar atau mahasiswa yang datang dari beberapa anak pulau yang ada di Indonesia. Dilihat dari beragamnya daerah asal mereka yang menjadikan karakter mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda dan kreatif. Itulah yang dapat menjadi karakter tersendiri komunitas film yang ada di Yogyakarta, dimana tempat mereka bergabung yang menjadikan keunikan tersendiri dalam berkreasi khususnya dalam pembuatan film.

Kembali pada persoalan tentang permohonan masyarakat film Indonesia dengan adanya pembubaran lembaga sensor film, akankah berdampak pada komunitas film yang ada di Yogyakarta. Karena apabila permohonan yang di ajukan oleh masyarakat film Indonesia diterima maka lembaga sensor film sendiri akan diganti menjadi lembaga klasifikasi. Di mana zaman yang sudah modern dan banyak kreatifitas yang muncul dari individu masing-masing terutama dalam pembuatan film, saat ini baik film nasional maupun film indie. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam membentuk opini komunitas film yang ada di Yogyakarta terhadap pro kontra pembubaran lembaga sensor film. Salah satunya adalah faktor sosiologis politik, dimana pola ataupun karakter

komunitas yang berbeda tentunya akan memiliki pandangan berbeda pula dalam melihat posisi atau keberadaan lembaga sensor film itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti mengambil suatu rumusan masalah yaitu ; "Bagaimana opini komunitas film di Yogyakarta dengan adanya pembubaran lembaga sensor film (LSF)"

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana opini komunitas film di Yogyakarta terhadap pro kontra pembubaran lembaga sensor film.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membentuk opini publik para komunitas film di Yogyakarta terhadap pro kontra pembubaran lembaga sensor film.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Akademik

Penelitian ini tentunya diharapkan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan ilmu pengetahuan, terutama kajian tentang teori opini publik yang mungkin beberapa waktu yang akan datang akan menjadi pendekatan yang efektif dalam penelitian pada komunitas film / media.

2. Secara Praktis

Bagi komunitas ataupun gerakan film dapat menjadi sebuah pedoman akan semangat yang pada awalnya terbentuk sebagai sebuah resistensi (*counter culture*) terhadap kelas penguasa ide dan gagasan yang menyebabkan kesadaran palsu di masyarakat melalui sebuah film.

## **E. Kerangka Teori**

Secara garis besar dalam tinjauan pustaka ini penulis akan memberikan gambaran tentang, pertama pengertian opini publik itu secara umum, kedua bagian lain dari pengertian opini publik, ketiga proses pembentukan opini publik, keempat faktor-faktor yang mempengaruhi opini publik, kelima pengertian etika, keenam undang-undang tentang perfilman yang berkaitan dengan sensor film.

### **1. Pengertian Opini Publik**

Seperti ilmu sosial lainnya, definisi opini publik (pendapat umum) sulit untuk dirumuskan secara lengkap dan utuh. Ada berbagai definisi yang muncul, tergantung dari sisi mana kita melihatnya.

Opini publik terdiri atas dua kata, yaitu opini dan publik. Dimana kata opini diambil dari kata *opinion* yang dalam bahasa Inggris berarti pendapat. Sedangkan publik sendiri berasal dari kata *public* dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam beberapa pengertian, yang tergantung pada konteks kata yang mengiringinya. Opini atau pendapat telah dipahami sebagai jawaban atas suatu pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi dalam suatu situasi tertentu. Walaupun

validitasnya lebih tipis dibanding dengan pengetahuan positif, namun opini atau pendapat lebih kuat dari dugaan atau sekedar kesan.

Menurut Rhenald Kasali dalam bukunya *Manajemen Public Relations* :

”opini publik berasal dari dua kata latin, yaitu *opinari* dan *publicus*. *Opinari* berarti berfikir atau menduga. Kata *opinion* sendiri mengandung akar kata *onis* yang berarti harapan. Kata *opinion* sendiri dalam bahasa inggris berhubungan erat dengan kata *option* dan *hope*, yang berasal dari bahasa latin *optio* yang artinya pilihan atau harapan. Sedangkan kata *publicus* mempunyai arti, ”milik masyarakat luas”. Dengan demikian, hubungan antara dua kata itu, opini publik, menyangkut hal seperti dugaan, perkiraan, harapan, dan pilihan yang dilakukan orang banyak” (Kasali Rhenald, 2003:16)

Ditinjau dari segi Ilmu Sosiologi, pemikiran *Emory S. Bogardus*, bahwa opini publik dari segi pengaruh politik. *Bogardus* berpendapat, opini publik merupakan dasar dari hukum. Kekuatan hukum tergantung dari dukungan yang diberi opini publik dan apabila opini publik mempunyai opini atau sikap tertentu terhadap suatu masalah, maka sikap itu mempunyai kekuatan hukum, tertulis ataupun tidak tertulis. (Olii, 2007: 22).

Opini publik dari segi ilmu Komunikasi. Komunikasi mengenai soal-soal tertentu, apabila dibawa dalam bentuk tertentu kepada orang-orang tertentu akan memberi efek tertentu pula. Tindakan komunikasi yang membawa persoalan kepada orang-orang dengan harapan akan memperoleh tanggapan atau umpan balik.

Menurut *Bernard Barelson*, bahwa opini publik adalah tanggapan orang-orang (yaitu pernyataan setuju, tidak setuju atau tidak peduli) terhadap masalah-masalah politik dan sosial yang mengandung pertentangan dan meminta perhatian umum. (Arifin, 2008:10).

Suatu yang ada dalam pemikiran manusia atau individu dan fikiran tersebut sebelum di keluarkan untuk bisa diperdebatkan itu dapat dikatakan sebuah opini. Cultip dan Center, mendefinisikan opini adalah suatu ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial, yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Dimana setiap orang diidentifikasi sebagai sejumlah publik, yang masing-masing terlibat dalam proses pembentukan opini tentang satu atau lebih persoalan yang menimbulkan pertentangan.

Bernard Hennessy , dalam bukunya Pendapat Umum, mengemukakan 5 faktor pendapat umum (opini publik): (Hennessy,1990:4)

- a. Adanya isu (*Presence of an issue*). Harus terdapat konsensus yang sesungguhnya, opini publik berkumpul di sekitar isu. Isu dapat didefinisikan sebagai situasi kontemporer yang mungkin tidak terdapat kesepakatan, paling tidak unsur kontroversi terkandung didalamnya dan juga isu mengandung konflik kontemporer.
- b. *Nature of publics*. Harus ada kelompok yang dikenal dan berkepentingan dengan persoalan itu.
- c. Pilihan yang sulit (*complex of preferences*), mengacu pada totalitas opini para anggota masyarakat tentang suatu isu.
- d. Suatu pernyataan / opini (*Expression of opinion*). Berbagai pernyataan bertumpuk sekitar isu. Pernyataan biasanya melalui kata-kata yang diucapkan atau dicetak, tetapi sewaktu-waktu gerak-gerik, kepalan tinju, lambaian tangan, dan tarikan napas panjang, merupakan suatu pernyataan/opini.
- e. Jumlah orang terlibat (*Number of persons involved*). Opini publik adalah besarnya (size) masyarakat yang menaruh perhatian terhadap isu.

## **2. Bagian dari pengertian lain opini publik.**

Dalam membahas pengertian opini publik ada beberapa bagian dari pengertian lain yang sangat berkaitan dengan opini publik. Menurut Emory S Bogardus (*The Making of Public Opinion*, New York:Association Press, 1951, halaman 5) istilah- istilah tersebut adalah:

- a. Opini Personal (*Personal Opinion*); yaitu penafsiran individual mengenai berbagai masalah dimana tidak terdapat suatu pandangan yang sama atau penafsiran mengenai fakta-fakta yang dihadapi, dimana terdapat kesulitan untuk memberi pembuktian atau pertentangan.
- b. Opini Pribadi (*Private Opinion*); suatu bagian dari opini personal yang tidak dinyatakan kerana adanya alasan tertentu.
- c. Opini Kelompok ; dimana opini kelompok hanya mungkin bila sudah ada opini personal. Opini kelompok biasanya muncul dari pendapat beberapa orang yang telah berstruktur (memiliki struktur organisasi yang jelas) dan kelompoknya sendiri tetap ada tanpa terpengaruh oleh pemunculan isu.
- d. Opini Koalisi (*Coalition Opinion*); apabila pada suatu saat dalam kelompok atau dalam suatu lingkungan yang demikian diperlukan adanya suatu aktivitas bersama, maka beberapa opini minoritas menggabungkan diri agar dapat mewujudkan suatu opini mayoritas. Opini demikian disebut dengan opini koalisi (*coalition opinion*).
- e. Opini Konsensus (*Consensus Opinion*); opini ini sangat penting karena diwujudkan dengan proses diskusi. Sebagaimana diketahui bahwa konsensus berarti mufakat bersama, karena itu opini konsesus merupakan bentuk opini yang mempunyai kekuatan lebih dari opini mayoritas.
- f. Opini Umum (*General Opinion*); opini yang berakar pada tradisi serta adat istiadat, berkembang dari dahulu hingga sekarang dan telah diterima sebagaimana adanya tanpa keberatan dan kritik dari generasi lama oleh generasi yang lebih muda. Opini umum biasanya berdasarkan nilai dan norma-norma yang berwujud sanksi sosial, sehingga apabila ada yang mempersoalkan berarti merupakan kaidah-kaidah sosial yang pada dasarnya sudah tidak dapat dipersoalkan lagi karena telah diterima menurut tradisi dan adat istiadat.

### **3. Proses pembentukan opini publik**

Proses pembentukan opini publik berasal dari opini individual yang diungkapkan oleh para anggota sebuah kelompok yang dipandang bergantung pada pengaruh-pengaruh yang dilancarkan kelompok tersebut. Opini publik biasanya terjadi setelah adanya pertentangan, pertikaian, dan perdebatan mengenai beberapa masalah kontroversial yang menyangkut sistem nilai, doktrin dan kesejahteraan sebuah kelompok.

Dasar terjadinya opini publik adalah dengan terjadinya arus yang keras, kelompok potensial atau umum, situasi yang bagaimana, arahnya ke mana, positif atau negatif. Semua hal diperhatikan akan ikut menentukan hasil yang lebih efektif dan berkualitas.

Selain itu, opini publik muncul karena adanya isu yang kontroversial. George Carslake Thompson, yang mengemukakan bahwa publik tertentu yang menghadapi isu yang kontroversial dapat mengeluarkan reaksi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kondisi yang juga berlainan. Menurut (Helena Ollie : 2007 : 55) Perbedaan itu disebabkan oleh tiga hal, yaitu :

- a. Perbedaan pandangan terhadap fakta.
- b. Perbedaan perkiraan tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan.
- c. Perbedaan motif yang serupa guna mencapai tujuan

Herbert Blumer mengemukakan adanya ciri-ciri terbentuknya opini publik : (Ollie,2007:56)

- a. Dihadapkan kepada suatu isu
- b. Terlibat dalam diskusi mengenai isu
- c. Memiliki perbedaan opini tentang cara mengatasi isu.

Opini publik terbentuk karena adanya aktivitas komunikasi yang bertujuan mempengaruhi orang lain atau pihak lain. Dalam prosesnya terjadi perubahan antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Konflik terjadi ketika:

- a. Konsensus / persetujuan yang tidak mufakat
- b. Proses penyesuaian satu sama lain tidak terpenuhi
- c. Perubahan yang sulit dilakukan.

Opini publik sudah terbentuk jika pendapat yang semula dipertentangkan sudah tidak lagi dipersoalkan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa opini publik merupakan hasil kesepakatan mutlak atau suara mayoritas setuju, karena kepada para anggota diskusi memang sama sekali tidak dimintakan pernyataan setuju. Opini publik terbentuk jika dalam diskusi tidak ada lagi yang menentang pendapat akhir karena sudah berhasil diyakinkan atau mungkin karena argumentasi untuk menolak sudah habis. Berdasarkan terbentuknya opini publik, kita mengenal opini publik yang murni. Opini publik murni adalah opini publik yang lahir dari reaksi masyarakat atas suatu masalah (isu). Sedangkan opini publik yang tidak murni dapat berupa (Sastroetro, 1990:106) :

- a. *Manipulated Public Opinion*, yaitu opini publik yang dimanipulasikan atau dipermainkan dengan cerdik.
- b. *Planned Public Opinion*, yaitu opini yang direncanakan.
- c. *Intended Public Opinion*, yaitu opini yang dikehendaki.
- d. *Programmed Public Opinion*, yaitu opini yang diprogramkan.
- e. *Desired Public Opinion*, yaitu opini yang diinginkan.

#### **4. Faktor-faktor yang mempengaruhi opini publik**

Menurut Redi Panuju, menegaskan dalam pergeseran yang terjadi dalam opini publik disebabkan beberapa faktor: (Helena Olii, 2007 : 46)

##### **a. Faktor Psikologis**

Adanya perbedaan berdasarkan faktor psikologis yang menyebabkan pemaknaan terhadap kenyataan yang sama bisa menghasilkan penyandian yang berbeda-beda atau bisa saja output tidak sama dengan input, karena beberapa unsur yang bekerja dalam seleksi internal bisa meliputi dimensi pemikiran (kognitif), bisa juga dimensi emosi (afeksi). Perbedaan kemungkinan bisa mencair karena hancurnya kepercayaan publik terhadap isu, bisa juga menyempit, bisa juga melebar karena ada kecenderungan gejala "hiper realitas" dalam komunikasi. Hasil dari proses perubahan psikologis, bisa menghasilkan pergeseran makna. Oleh karena itu, dalam opini publik sering sekali dengan kenyataan, sebab dalam kenyataannya opini publik itu semata-mata merupakan hasil penyandian individu-individu.

##### **b. Faktor Sosiologis Politik**

Ada anggapan bahwa opini publik terlibat dalam interaksi sosial, misalnya:

- 1) Opini publik bersifat dinamis, maka keberpihakannya pun bersifat relatif, dan cenderung berpihak pada kelompok atau individu yang memiliki keterdekatan hubungan.
- 2) Opini publik mewakili suatu kejadian, sehingga individu merasa keberadaannya dalam opini publik serta keterlibatan sebagai bagian anggota masyarakat.
- 3) Opini publik berhubungan dengan citra, rencana dan operasi.
- 4) Opini publik disesuaikan dengan kemauan banyak orang. Oleh karena, banyak orang berlomba memanfaatkan opini publik sebagai argumentasi atas alasan memutuskan sesuatu.
- 5) Opini publik identik dengan hegemoni ideologi. Kelompok atau pemerintahan ingin tetap terus berkuasa, maka mereka harus mampu menjadikan ideologi kekuasaan menjadi dominan dalam opini publik.

**c. Faktor Budaya**

Budaya mempunyai pengertian yang beraneka ragam. Budaya dapat diartikan sebagai seperangkat nilai yang dipergunakan untuk mengelola kehidupan manusia, memelihara hidupnya, menjaga dari gangguan internal maupun eksternal dan mengembangkannya. Nilai-nilai yang terhimpun dalam sistem budaya itu oleh individu menjadi identitas sosialnya, menjadi ciri-ciri dari anggota komunitas budaya tertentu.

Masyarakat kita juga menyenangi gosip atau isu atau rumor (desas-desus), sehingga gejala "memetics" cepat menjadi kelipatan reproduksi yang menembus jaringan-jaringan sosial yang terisolir. Sehingga menyebabkan interaksi antara tradisi dan etika.

#### **d. Faktor Media Massa**

Menurut Redi Panuju, mengutip Meyer, interaksi antara media dengan institusi masyarakat menghasilkan produk isi media (media content). Oleh audiens, isi media diubah menjadi gugusan-gugusan makna, apakah yang dihasilkan dari proses penyandian pesan tersebut.

Persepsi masyarakat dapat dibentuk oleh media massa. Media massa dapat membentuk pendapat umum dengan cara pemberitaan yang sensasional dan berkesinambungan. Oleh media massa orang dapat terpengaruhi oleh beberapa pemberitaan yang ada, karena disetiap media massa mereka mempunyai kemasan masing-masing untuk menyampaikan pendapatnya. Bahkan orang cenderung dibuat pusing mana yang benar-benar berita atau hanya sensasi saja yang dibuat oleh oknum media massa.

### **5. UU No. 8 Tahun 1992 tentang perfilman**

Dibawah ini adalah beberapa pasal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam pro-kontra pembubaran lembaga sensor film yaitu adanya penyensoran. Yang mana pada umumnya sebagai pelaku

perfilman Indonesia telah dirugikan hak konstitusionalnya. Karena menurut mereka, jika salah satu adegan film di potong maka akan timbul penyampaian pesan yang tidak maksimal sebagai mana yang akan di tampilkan dalam film tersebut. Mengingat bahwa dalam Undang-undang yang dimaksud dengan sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu. Dalam BAB V Sensor Film ada pada pasal 33 dan pasal 34 yaitu:

- a. Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.
- b. Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa sebuah film :
  1. Diluluskan sepenuhnya;
  2. Dipotong bagian gambar tertentu;
  3. Ditiadakan suara tertentu;
  4. Ditolaknya seluruh film; untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.
- c. Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film maupun terhadap film impor.

- d. Film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi tanda lulus sensor oleh lembaga sensor film.
- e. Selain tanda lulus sensor, lembaga sensor film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan.
- f. Film, reklame film, atau potongannya yang ditolak oleh lembaga sensor film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum.
- g. Terhadap film yang ditolak oleh lembaga sensor film, perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman .

Dalam pasal 34 dikatakan bahwa:

- a. Penyensoran film dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan oleh sebuah lembaga sensor film.
- b. Penyelenggaraan sensor film dan reklame film dilakukan berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran.
- c. Pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi lembaga sensor film, serta pedoman dan kriteria penyensoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai salah satu komponen dalam opini publik, dan pro kontra yang terjadi dengan lembaga sensor film yang berkaitan dengan undang-



Opini atau pendapat yang telah dipahami sebagai jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi dalam situasi tertentu. (Arifin Anwar, 2008;6).

## **2. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan cara penulisan taktis agar konsep bisa berhubungan dengan praktek. Karena dalam penelitian ini hanya menggunakan satu variabel, maka definisi operasional dalam penelitian ini mencakup opini komunitas film di Yogyakarta ketika terjadi pro kontra pembubaran lembaga sensor film. Opini ini dikelompokkan kedalam:

### **a. Variable Independen 1: Opini komunitas film di Yogyakarta**

Variable ini diukur dengan :

- 1) Tingkat ketertarikan responden terhadap pro kontra pembubaran lembaga sensor film.
- 2) Tingkat pemahaman responden terhadap pro kontra pembubaran lembaga sensor film.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif survai. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

(Singarimbun, 1995:4-5). Pada survai, ciri pemairan ditonjolkan di hampir semua pengungkapannya, dan karena populasinya yang luas menyebabkan penelitian ini tidak mampu mencapai ke dalam data seperti studi kasus. Survai memungkinkan untuk menggeneralisasi suatu gejala sosial atau variabel sosial tertentu kepada gejala sosial atau variabel sosial dengan populasi yang lebih besar. Dalam penelitian survai dimungkinkan pula peneliti menggunakan sampel untuk meringankan penelitian karena populasi yang besar (Burhan Bungin, 2005:36).

## **2. Lokasi Penelitian**

Didalam tulisan ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan alasan representasi perkembangan film di Indonesia.

## **3. Populasi**

Dalam suatu penelitian kuantitatif selalu berhadapan dengan masalah sumber data yang disebut populasi. Secara lebih jelas populasi itu merupakan keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala atau peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian, (Susanto. 2000;65). Populasi dalam penelitian ini adalah komunitas film di Yogyakarta. Populasi dari penelitian ini sebanyak 450 orang dari komunitas yang masih aktif.

#### **4. Sampel**

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam penelitian ini untuk pengambilan sampel akan menggunakan teknik *Snowball Sampling* yaitu teknik penarikan sample bola salju digunakan peneliti jika peneliti tidak memiliki informasi tentang anggota populasi. Peneliti hanya memiliki satu nama populasi, dari mana peneliti akan memperoleh nama-nama lainnya. Teknik ini biasanya digunakan jika kita meneliti kasus yang sensitif atau rahasia. (Bambang P. 2005 : 135). Jadi, pengumpulan data yang telah diberikan penjelasan oleh peneliti akan mengambil siapa yang menurut pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Pecahan sampling yang digunakan untuk mendapatkan ukuran sampel sebesar 0,2 Jadi penghitungan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah  $450 \times 0,2 = 90$ . Maka sampel yang diambil sebanyak 90 orang dari komunitas film yang ada di Yogyakarta.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pada teknik pengumpulan data ini, data dikumpulkan secara langsung dari sumber primer yaitu komunitas film di Yogyakarta dan

peneliti terjun langsung untuk mengumpulkan data dan analisa data secara langsung.

Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui :

a. Penelitian Lapangan

Meliputi beberapa hal, yaitu:

1) Kuesioner

Kuesioner atau lebih dikenal dengan angket merupakan alat pengumpulan data yang berupa serangkaian daftar pertanyaan untuk dijawab responden. Kuesioner dapat disebut juga sebagai interview tertulis di mana responden dihubungi melalui daftar pertanyaan. (Masri Singarimbun. 1989:175).

Terdapat 4 macam jenis pertanyaan, yaitu:

a) Pertanyaan Tertutup (*Close Question*)

Yaitu pertanyaan yang kemungkinan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban lain.

b) Pertanyaan Terbuka (*Open Question*)

Yaitu pertanyaan yang kemungkinan jawabannya tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas memberikan jawaban.

c) Kombinasi Terbuka Dan Tertutup

Yaitu pertanyaan yang jawabannya sudah ditentukan tetapi kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka.

d) Pertanyaan Semi Terbuka

Yaitu pertanyaan yang jawabannya sudah tersusun tetapi masih ada kemungkinan tambahan jawaban.

Dalam penelitian ini jenis pertanyaan kuesioner yang akan digunakan adalah kuesioner semi terbuka dan tertutup.

2) Wawancara

Data utama dari penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan. Untuk itu wawancara sangatlah penting. Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada sample (informan) yang mengarah kepada fokus penelitian. Adapun informan yang dipilih penulis untuk diwawancarai dalam mengambil data sebagai pelengkap penelitian.

## **6. Teknik Pengambilan Informan**

Teknik pengambilan Informan yaitu cara-cara pengambilan sampling di dalam penelitian. Dalam penelitian ini untuk pengambilan sampel akan menggunakan teknik penarikan sample bola salju atau yang lebih dikenal dengan *snowball sampling*. Teknik penarikan sample bola salju digunakan peneliti jika peneliti tidak memiliki informasi tentang anggota populasi. Peneliti hanya memiliki satu nama populasi, dari mana

peneliti akan memperoleh nama-nama lainnya. Teknik ini biasanya digunakan jika kita meneliti kasus yang sensitif atau rahasia. (Bambang P. 2005 : 135). Jadi, pengumpulan data yang telah diberikan penjelasan oleh peneliti akan mengambil siapa yang menurut pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

## **7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode kuantitatif. Penelitian ini hanya menggambarkan suatu variabel, keadaan atau gejala yang diteliti secara apa adanya dari data yang bersifat angka (kuantitatif). Jenis penelitian deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan ragam survai. Survai merupakan suatu cara mengenai penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dimana penelitian survai adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. (Singarimbun, 1989:3)

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KOMUNITAS FILM DI YOGYAKARTA**

#### **A. Profil Beberapa Komunitas Film Di Yogyakarta**

Pada bab ini juga akan dibahas tentang lokasi/tempat penelitian yaitu Yogyakarta, profil organisasi komunitas film di Yogyakarta, aktivitas komunitas film di Yogyakarta, kehidupan komunitas film di Yogyakarta dan ruang sosial komunitas film. Dimana sebelum kita membahas tentang profil dari komunitas film yang ada di Yogyakarta, perlu kita ketahui alasan pemilihan komunitas yang akan dibahas yaitu sesuai dengan teori snowball sampling. Yang mana peneliti mendapatkan data bahwa dari jumlah komunitas film yang masih aktif dan berdasarkan saran dari komunitas film yang sudah terselektif, terpilih ada 3 komunitas sebagai responden pertama sesuai dengan teori snowball sampling. Serta mampu menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan dalam kuesioner. Karena banyaknya komunitas yang ada tidak memungkinkan untuk diteliti satu persatu. Berikut adalah profil beberapa komunitas film yang ada di Yogyakarta.

##### **1. Karya Anak Coret**

Komunitas Coret lahir pada 16 April 2005 setelah Workshop Creative Writing Berkelanjutan (WCWB) I yang difasilitasi oleh Lembaga